



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : KOMISI YUDISIAL
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DESMIHARDI
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 1001841

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 8.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/198 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 354 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/168 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.725.000.000**

1. MOBIL, SEDAN MERCEDES BENZ C300 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. MOBIL, CRV PRESTIGE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. MOBIL, MAZDA CX5 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASIC CX5 STEALTH BLACK Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. MOTOR, VESPA SPRINT 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 1.290.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.555.865.079**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 14.170.865.079

III. HUTANG

Rp. 1.536.712.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.634.153.079

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.